

## REVITALISASI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PASCA IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSI

*Slamet Hw dan Joko Santosa*

Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Surakarta  
slamethw0406@yahoo.com  
slamet\_1@ums.ac.id

### ABSTRAK

*Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang mengikutsertakan ABK untuk belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah biasa. Sekolah Luar Biasa (SLB) diselenggarakan untuk melayani anak dalam usia sekolah yang berkebutuhan khusus (memiliki kelainan fisik atau mental). Bila penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah bisa menampung semua anak yang berkebutuhan khusus, sekolah luar biasa menjadi tidak diperlukan lagi. Terlepas dari kenyataan penyelenggaraan kelas inklusi, yang menjadi masalah adalah keberadaan Sekolah Luar Biasa pasca implementasi sekolah inklusi. Atas dasar tersebut, maka perlu penelitian untuk mengetahui permasalahan penyelenggaraan SLB pasca implementasi sekolah inklusi. Penelitian dilaksanakan pada 12 SLB di empat Kabupaten/Kota wilayah Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun diselenggarakan sekolah inklusi, semua responden menjawab optimis bahwa SLB tetap akan eksis, tidak ada masalah karena berbagai alasan: (1) tidak semua ABK bisa ditampung/ditangani oleh sekolah inklusi, anak tuna grahita (ringan, sedang) yang memiliki kekhususan, yaitu IQ-nya di bawah anak normal biasa tidak bisa diikuti sertakan pada kelas inklusi bersama anak normal biasa, anak tuna rungu wicara juga tidak mudah masuk kelas inklusi, anak tuna netra yang memiliki IQ normal di atas rata-rata kemungkinan bisa masuk di sekolah inklusi asal disertai dengan Guru Pembimbing Khusus (GPK), anak tuna daksa yang memiliki IQ normal di atas rata-rata paling memungkinkan bisa diterima di sekolah inklusi, anak lambat belajar dan anak autis juga memungkinkan bisa ditangani oleh sekolah inklusi asal ada GPK, (2) sebagian besar orang tua dari anak penyandang ketunaan masih lebih mempercayakan anaknya dididik di SLB yang sudah cukup berpengalaman daripada memasukkan anaknya pada sekolah inklusi yang belum berpengalaman, (3) Sekolah inklusi bisa dibuka di daerah/kecamatan yang tidak ada SLB-nya; tentang GPK-nya bisa bekerjasama dengan SLB terdekat, (4) sebagian besar masyarakat, terutama dari kalangan orang tua anak ABK belum tahu persis tentang sekolah inklusi dibanding SLB yang sudah lebih familiar, dan (5) SLB yang ada sekarang sudah cukup mapan, sarana dan prasarana cukup memadai, gedung dan peralatan cukup representatif, secara institusional memiliki legalitas yang kuat, dan tenaga cukup profesional, sehingga SLB akan tetap eksis keberadaannya sekalipun telah ada sekolah inklusi.*

**Kata kunci:** SLB, sekolah inklusi

## ABSTRACT

*Inclusion education is the education which incorporates children with special needs to learn with peers in regular schools. Extraordinary School is the one which is organized to serve school-age children with special needs (having a physical or mental disorder). With regards to the implementation of inclusion education, people question about the existence of Extra Ordinary Schools. The problem is how the existence of Extraordinary School after the enactment of Inclusion Education. It is important to investigate this issue. The study was conducted in 12 Extraordinary Schools in four districts of Surakarta. The result indicates that most respondents answered optimistically that Extraordinary Schools will exist, due to various reasons: (1) not all of the staff can be accommodated by the School Inclusion, hearing and mentally disabled children (light, medium) which have a special feature that is his IQ below normal child can no longer be admitted to the class with regular normal children, deaf children have difficulty to attend inclusion class, blind children who have normal average IQs can attend Inclusion School with supervision of Special Teacher, disabled children who have normal IQ most likely to be accepted in the Inclusion School, slow-learning children and children with autism also can be handled by special teacher Inclusion School, (2) The most parents of children with disabilities still entrust their children educated in special schools who have enough experience rather than send their children to Inclusion school, (3) Inclusion Education can be managed in collaboration with Extraordinary School nearby (4) the majority of people, especially young parents do not know about Inclusion School, and (5) the existing Extraordinary School is well established, with adequate infrastructure, has a strong legal basis, and professional teachers. Thus Extraordinary School will remain there despite the existence of Inclusion School.*

**Key words:** *extraordinary school, inclusion school*

## PENDAHULUAN

UU SPN No.20 tahun 2003, Bab IV Pasal 5 ayat 1 dan 2 memaparkan bahwa: (1) Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, (2) Warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan intelektual berhak memperoleh pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang mengikutsertakan ABK untuk belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Pendidikan luar biasa adalah program pembelajaran yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan unik dari individu siswa. Pendidikan luar biasa merupakan salah satu komponen dalam salah satu pemberian layanan yang kompleks dalam membantu individu untuk mencapai potensinya secara maksimal. Sekolah Luar Biasa diselenggarakan untuk melayani anak dalam usia sekolah yang berkebutuhan khusus (memiliki kelainan fisik atau mental) yang tidak dapat dilayani di sekolah umum/biasa.

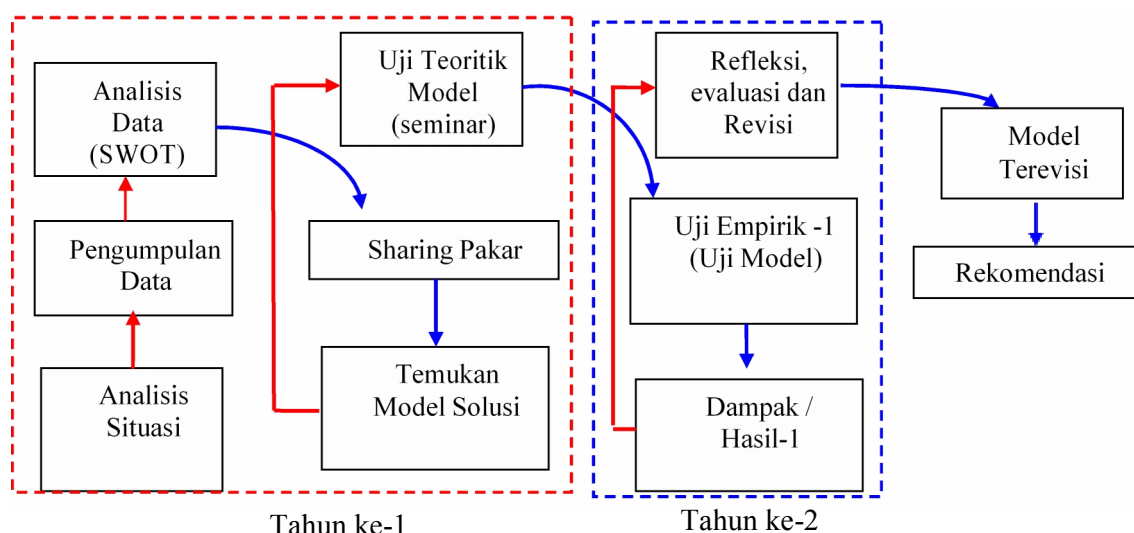
Bila penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, yakni sudah bisa menampung semua anak yang berkebutuhan khusus, maka sekolah luar biasa menjadi

tidak diperlukan lagi. Terlepas dari kenyataan penyelenggaraan kelas inklusi sudah sesuai dengan idealisme atau belum, yang menjadi masalah adalah keberadaan Sekolah Luar Biasa pasca implementasi Sekolah Inklusi.

Atas dasar latar belakang sebagaimana diuraikan, maka pentingnya penelitian adalah untuk menggali permasalahan penyelenggaraan SLB pasca implementasi Program Inklusi untuk selanjutnya dapat dicari alternatif pemecahannya. Lebih lanjut, tujuan khusus penelitian ini adalah: (1) diperolehnya profil/pemetaan sekolah luar biasa, (2) lewat analisis SWOT, diperolehnya deskripsi data potensi sebagai pijakan untuk menemukan alternatif revitalisasi SLB pasca implementasi Program Pendidikan Inklusif. Penelitian tentang sekolah inklusi sudah menjadi perhatian peneliti, seperti Herdiana(2010), Juwono (2011), Haifani (2011), dan Rahmah Marsidi (2011).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan (*Developmental research*) berorientasi pada pengembangan produk yang proses pengembangannya dideskripsikan setelah mungkin dan produk akhirnya dievaluasi. Aktivitas penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahapan. Kedua tahapan digambarkan sebagai berikut.



Gambar1. Tahapan Aktivitas Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta potensi sekolah luar biasa pasca implementasi prpgram pendidikan inklusi didasarkan jenis kebutuhan dan banyak siswa, penyelenggaraan pendidikan, standar pelayanan pendidikan, guru pembimbing khusus, tenaga profsional, alat bantu kemandirian, dan profil kepala sekolah. Selain itu, disampaikan penggalian tanggapan kepala sekolah serta deskripsi dukungan masyarakat, orang tua, dan lingkungan.

## 1. Jenis Ketunaan dan Banyaknya Siswa

Penelitian dilaksanakan di empat kabupaten/kota (Surakarta, Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri) dari tujuh kabupaten/kota di wilayah Surakarta. SLB yang diteliti sebagai sampel dipilih empat SLB Negeri dan delapan SLB Swasta. Jenis ketunaan yang diteliti ada delapan, yaitu: (1) tuna netra, (2) tuna rungu wicara, (3) tuna grahita, (4) tuna daksa, (5) tuna laras, (6) autis, (7) tuna ganda, dan (8) lambat belajar;

Dari empat SLB Negeri, semuanya menyelenggarakan pendidikan lebih dari satu jenis ketunaan dari tingkat TK sampai SLA. Dari delapan SLB Swasta, ada empat SLB yang menyelenggarakan pendidikan dengan lebih dari satu ketunaan, sedangkan empat SLB Swasta yang lain hanya menyelenggarakan satu jenis ketunaan. Adapun jenis ketunaan yang diselenggarakan SLB dan banyaknya siswa tiap jenjang pendidikan tampak dalam tabel 1 dan 2 berikut:

Tabel 1. Jenis Ketunaan Peserta Didik dan Banyak Siswa di 4-SLB Negeri

Jenis ABK	TK	SD	SLP	SLA	Jumlah
1. Tuna netra	-	11	1	-	12
2. Tuna rungu dan wicara	29	89	14	24	156
3. Tuna grahita	31	309	58	28	426
4. Tuna daksa	-	24	-	-	24
5. Tuna laras	-	-	-	-	0
6. Autis	2	28	2	-	32
7. Tuna ganda	-	-	-	-	0
8. Lambat belajar	-	21	-	4	25
Jumlah	62	482	75	56	675

Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa baik SLB negeri maupun swasta memiliki peserta didik tuna grahita terbanyak. SLB negeri tidak mempunyai peserta didik tuna laras dan tuna ganda dan paling sedikit peserta didik tuna netra. sementara SLB swasta memiliki peserta didik dari semua jenis ketunaan dan paling sedikit adalah peserta didik yang memiliki ketunaan lambat belajar.

Tabel 2. Jenis Ketunaan Peserta Didik dan Banyak Siswa di 8-SLB Swasta

Jenis ABK	TK	SD	SLP	SLA	Jumlah
1. Tuna netra	3	22	19	4	48
2. Tuna rungu dan wicara	18	105	24	7	154
3. Tuna grahita	15	254	94	48	411
4. Tuna daksa	21	37	45	34	137
5. Tuna laras	-	60	24	-	84
6. Autis	4	1	-	-	5
7. Tuna ganda	3	2	1	-	6
8. Lambat belajar	-	2	-	-	2
Jumlah	64	483	207	93	847

Tabel 3. Jenis Ketunaan Peserta Didik dan Banyak Siswa SLB Negeri dan Swasta

Jenis ABK	TK	SD	SLP	SLA	Jumlah	Persentase
1. Tuna netra	3	33	20	4	<b>60</b>	3,94
2. Tuna rungu dan wicara	47	194	46	39	<b>326</b>	21,42
3. Tuna grahita	46	563	144	68	<b>821</b>	53,94
4. Tuna daksa	21	61	45	34	<b>161</b>	10,58
5. Tuna laras	-	60	24	-	<b>84</b>	5,52
6. Autis	6	29	2	-	<b>37</b>	2,43
7. Tuna ganda	3	2	1	-	<b>6</b>	0,39
8. Lambat belajar	-	23	-	4	<b>27</b>	1,77
<b>Jumlah</b>	<b>126</b>	<b>965</b>	<b>282</b>	<b>149</b>	<b>1522</b>	<b>100</b>
Persentase	8,28	63,40	18,53	9,79		

Tabel 3 menunjukkan bahwa peserta didik penyandang tuna grahita adalah peserta didik yang paling banyak (53,94%), disusul tuna rungu wicara (21,42%), kemudian tuna daksa (10,58%), tuna laras (5,52%), tuna netra (3,94%), autis (2,43%), lambat belajar (1,77%), dan tuna ganda (0,39%). Di samping itu, peserta didik yang paling banyak adalah tingkat SD (63,40%), kemudian tingkat SLP (18,53%), SLA (9,79%), dan TK (8,28%)

## 2. Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam penyelenggaraan pendidikan, beberapa SLB negeri maupun swasta menyediakan asrama bagi peserta didik. Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui tabel 4.

Tabel 4. Penyediaan Asrama bagi Peserta Didik pada SLB Negeri dan Swasta

Tingkat	Asrama	Non Asrama
TK	1 SLB Swasta	2 SLB Negeri
SD	2 SLB Negeri 6SLB Swasta	2 SLB Negeri 8 SLB Swasta
SLP	2 SLB Negeri 6 SLB Swasta	1 SLB Negeri 8 SLB Swasta
SLA	1 SLB Negeri 4 SLB Swasta	2 SLB Negeri 7 SLB Swasta

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa SLB yang menyediakan asrama lebih banyak adalah SLB swasta. Baik jenjang SD, SLP, maupun SLA SLB swasta lebih banyak menyediakan asrama, bahkan pada jenjang TK hanya SLB swasta yang menyediakan asrama.

## 3. Standar Pelayanan Pendidikan

Tolok ukur standar pelayanan pendidikan antara lain pemenuhan standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, penilaian, dan pembiayaan. Banyaknya SLB yang telah memenuhi delapan standar pelayanan pendidikan masing-masing dapat dijelaskan melalui tabel- tabel berikut.

### a. Standar Isi

Kepemilikan perangkat standar isi oleh keseluruhan SLB dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Kepemilikan Standar Isi

Item	Ada/punya	Tidak ada
Kerangka Dasar dan struktur kurikulum	12 SLB = 100 %	-
Beban belajar	12 SLB = 100 %	-
Kurikulum Satuan Pendidikan	12 SLB = 100 %	-
Kalender Pendidikan	12 SLB = 100 %	-

Berdasarkan data dari tabel 5, diketahui bahwa dari 12 SLB seluruh SLB (100%) telah memiliki dokumen sesuai komponen standar isi, baik dokumen yang berwujud kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, Kurikulum Satuan Pendidikan, dan kalendr pendidikan.

### b. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Kepemilikan dokumen Standar Kompetensi Lulusan oleh kedua belas SLB dapat dijelaskan melalui tabel 6.

Tabel 6. Kepemilikan SKL

Item	Ada/punya	Tidak ada
SKL Satuan Pendidikan	12 SLB = 100 %	
SKL Kelompok Mata Pelajaran	12 SLB = 100 %	
SKL Mata Pelajaran	12 SLB = 100 %	

Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 12 SLB seluruh SLB (100%) telah memiliki dokumen standar kompetensi Lulusan (SKL), baik SKL tingkatsatuan pendidikan, SKL kelompok Mata Pelajaran, dan SKL mata pelajaran.

### c. Standar Proses

Kepemilikan perangkat standar isi oleh keseluruhan SLB dapat dijelaskan melalui tabel tujuh berikut:

Tabel 7. Kepemilikan Perangkat Pembelajaran

Item	Ada/punya	Tidak ada
Perencanaan Pembelajaran:		
1. Silabus	12 SLB = 100 %	
2. Rencana Program Pembelajaran (RPP)	12 SLB = 100 %	
3. Prinsip-prinsip Penyusunan RPP	12 SLB = 100 %	
Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Terlaksana 12 SLB = 100 %	Tidak
Penilaian Hasil Pembelajaran	Ada 12 SLB = 100 %	Tidak ada
Pegawasan Proses Pembelajaran	12 SLB = 100 %	
Pelaporan	12 SLB = 100 %	
Tindak lanjut	12 SLB = 100 %	

Berdasarkan data dari tabel 7, diketahui bahwa dari 12 SLB seluruh SLB (100%) telah memiliki dokumen perangkat pembelajaran baik dokumen perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan proses pembelajaran, pelaporan, dan tindak lanjut pembelajaran.

#### d. Standar Sarana dan Prasarana

Kepemilikan standar sarana dan prasarana oleh keseluruhan SLB dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 8. Kepemilikan Sarana dan Prasarana

Item	Ada / memadai	Kurang	Tidak ada
Lahan	4 SLB Negeri	-	
	6 SLB Swasta	2 SLB Swasta	
Bangunan Gedung	3 SLB Negeri	1 SLB Negeri	
	6 SLB Swasta	2 SLB Swasta	
Kelengkapan sarana dan prasarana	3 SLB Negeri	1 SLB Negeri	
	5 SLB Swasta	3 SLB Swasta	
Ruang penunjang	2 SLB Negeri	2 SLB Negeri	
	4 SLB Swasta	4 SLB Swasta	
Ruang Perpustakaan	3 SLB Negeri	1 SLB Negeri	
	6 SLB Swasta	1 SLB Swasta	1 SLB S
Ruang Laboratorium	-	1 SLB Negeri	3 SLB N
	1 SLB S	2 SLB S	5 SLB S

Berdasarkan data dari tabel 8, diketahui bahwa satu SLB swasta tidak memiliki ruang perpustakaan dan lima SLB swasta tidak memiliki ruang laboratorium. Sementara SLB Negeri yang tidak memiliki ruang perpustakaan ada tiga. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan standar sarana dan prasarana di beberapa SLB baik negeri maupun swasta.

#### e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kepemilikan standar pendidik dan tenaga kependidikan oleh keseluruhan SLB dapat dijelaskan melalui tabel 9 berikut:

Tabel 9. Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Item	Sangat Memenuhi	Cukup memenuhi	Kurang memenuhi
Kualifikasi Pendidik	1 SLB N	3 SLB N	
	2 SLB S	6 SLB S	
Kompetensi Guru	1 SLB N	3 SLB N	
	3 SLB S	5 SLB S	
Tenaga Kependidikan	2 SLB N	2 SLB N	
	-	6 SLB S	2 SLB S
Tenaga laboratorium	-	-	4 SLB N
		1 SLB S	7 SLB S
Tenaga Perpustakaan		1 SLB N	3 SLB N
	1 SLB S	2 SLB S	5 SLB S

Berdasarkan data dari tabel 9, diketahui bahwa dari 12 SLB terdapat empat SLB Negeri yang tidak memiliki tenaga laboratorium dan tujuh SLB swasta yang tidak memiliki tenaga laboratorium. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa tenaga yang kurang memenuhi, baik di SLB negeri maupun swasta adalah tenaga laboratorium dan perpustakaan.

#### f. Standar Pengelolaan

Kepemilikan standar pengelolaan bagi keseluruhan SLB dapat dijelaskan melalui tabel 10 berikut:

Tabel 10. Kepemilikan Dokumen Pengelolaan

<b>Item</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak ada</b>
Perencanaan Program	Semua SLB	
1. Visi dan Misi Sekolah		
2. Tujuan Sekolah		
Rencana Kerja Sekolah	Semua SLB	
Pengawasan dan evaluasi	Semua SLB	
Kepemimpinan Sekolah	Semua SLB	
Sistem Informasi dan Manajemen	Semua SLB	

Berdasarkan data dari tabel 10, diketahui bahwa dari 12 SLB seluruh SLB (100%) telah memiliki standar pengelolaan yang baik, yang ditunjukkan dengan kepemilikan semua item dokumen pengelolaan yang dibutuhkan.

#### g. Standar Penilaian

Kepemilikan standar penilaian oleh keseluruhan SLB dapat dijelaskan melalui tabel 11 berikut:

Tabel 11. Kepemilikan Dokumen Penilaian

<b>I</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak ada</b>
Pedoman Penilaian	Semua SLB	
Penilaian oleh Pendidik	Semua SLB	
Penilaian oleh Satuan Pendidikan	Semua SLB	
Penilaian oleh Pemerintah	Semua SLB	

Berdasarkan data dari tabel 11, diketahui bahwa seluruh SLB (100%) telah memiliki semua jenis dokumen penilaian yang diperlukan. perangkat pembelajaran baik



## h. Standar Pembiayaan

Tabel 12. Kepemilikan Dokumen Pembiayaan

I	Ada	Tidak ada
Pembiayaan rutin (gaji guru, karyawan)	Semua SLB	
Biaya pengembangan	3 SLB N 8 SLB S	1 SLB N
Biaya pengadaan sarana dan prasarana	2 SLB N 5 SLB S	2 SLB N 3 SLB S

Berdasarkan data tabel 12, diketahui bahwa seluruh SLB (100%) telah memiliki dokumen pembiayaan rutin (gaji guru dan karyawan), sementara masih ada SLB yang belum memiliki dokumen pembiayaan berupa Biaya pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana.

## 4. Tentang Guru Pembimbing Khusus (GPK)

Tabel 13. Kondisi Guru pembimbing Khusus

Jenis ABK	GPK			Sertifikasi	
	Pria	Wanita	Jml	Sudah	Belum
1. Tuna netra	5	4	9	4	5
2. Tuna rungu dan wicara	4	12	16	4	12
3. Tuna grahita	17	37	54	32	22
4. Tuna daksa	3	1	4	-	4
5. Tuna laras	-	-	-	-	-
6. Autis	2	2	4	1	3
7. Tuna ganda	2	3	5	-	5
8. Lambat belajar	4	15	19	-	19
Jumlah	37	74	111	40	71

Berdasarkan data dari tabel 13, diketahui bahwa guru pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi lebih sedikit dari pada yang belum tersertifikasi. bahkan seluruh guru pembimbing khusus Tuna daksa, Tuna ganda, dan Lambat belajar belum ada yang sertifikasi. Hanya guru pembimbing khusus Tuna grahita yang telah sertifikasi jumlahnya lebih banyak dari pada yang belum.

## 5. Tenaga Profesional (Dokter, Psikolog, Pakar Pendidikan)

Tabel 14. Kepemilikan Tenaga Profesional

Tenaga Profesional	Ada	Tidak	Jml	Kerjasama dg Instansi
1. Dokter	4 SLB			RS, Puskesmas
2. Psikolog	9 SLB			UNS
3. Pakar Pendidikan	8 SLB			UNS, Diknas
4. Pakar lainnya	7 SLB			RSJ, PLB UNS, Terapis

Berdasarkan data dari tabel 14, diketahui bahwa masih ada SLB yang tidak memiliki tenaga profesional baik dokter, psikolog, pakar pendidikan, dan lain sebagainya.

## 6. Alat Bantu Kemandirian

Beberapa ABK memerlukan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, tongkat raba, dan lain-lain.

### a. Alat Bantu Kemandirian secara Kuantitatif

Tabel 15. Kondisi Alat Bantu Kemandirian secara Kuantitatif

Jenis ABK	Alat Bantu Kemandirian	
	Mencukupi	Tidak mencukupi
a. Tuna netra	3 SLB	3 SLB
b. Tuna rungu dan wicara	4 SLB	3 SLB
c. Tuna daksa	2 SLB	4 SLB

Berdasarkan data dari tabel 15, diketahui bahwa masih ada SLB yang tidak mempunyai alat bantu kemandirian yang mencukupi. Dari 12 SLB tidak lebih dari 4 SLB yang memiliki alat bantu kemandirian yang mencukupi.

### b. Alat Bantu Kemandirian secara Kualitatif

Tabel 16. Kondisi Alat Bantu Kemandirian secara Kualitatif

Jenis ABK	Alat Bantu Kemandirian		
	Memadahi	Cukup memadahi	Kurang memadahi
1. Tuna netra		3 SLB	1 SLB
2. Tuna rungu dan wicara		2 SLB	1 SLB
3. Tuna daksa	1 SLB	-	1 SLB

Berdasarkan data dari tabel 16, diketahui bahwa dari 12 SLB hanya 1 SLB yang memiliki alat bantu kemandirian tuna daksa yang memadai secara kualitatif. Selebihnya tidak ada SLB yang memiliki alat bantu kemandirian tuna netra dan tuna rungu dan wicara yang memadai secara kualitatif.

## 7. Profil Kepala Sekolah

Dari 12 SLB yang diteliti, diperoleh profil Kepala Sekolah sebagaimana dijelaskan melalui tabel 17. Status kepala sekolah PNS lebih banyak daripada yang berstatus nonPNS. Dilihat dari segi pengalaman mengajar, kepala sekolah dengan pengalaman mengajar antara 20-30 tahun berjumlah paling banyak, paling sedikit adalah kepala sekolah dengan pengalaman mengajar antara 10-20 tahun. Dari segi pengalaman menjadi kepala sekolah, jumlah terbanyak adalah yang telah menjadi kepala sekolah selama 10-20 tahun. Pendidikan tertinggi kepala sekolah adalah S2. Namun kepala sekolah yang berpendidikan S1 lebih banyak daripada yang telah berpendidikan S2. Sementara itu, hampir semua kepala sekolah sudah sertifikasi, hanya satu SLB yang memiliki kepala sekolah belum sertifikasi.

Tabel 17. Profil Kepala Sekolah

Aspek	Kriteria	Jumlah
a. Status	PNS	11
	Non PNS	1
b. Pengalaman mengajar	Lebih dari 30 tahun	4
	Antara 20-30 tahun	6
	Antara 10-20 tahun	2
c. Pengalaman menjadi Kepala Sekolah	Antara 10-20 tahun	7
	Antara 5-10 tahun	4
	Kurang dari 5 tahun	1
d. Pendidikan tertinggi	S 2	5
	S 1	7
e. Pangkat/golongan	IV.b	1
	IV.a	10
	Lainnya	1
f. Sertifikasi Guru dalam jabatan	Sudah sertifikasi	11
	Belum sertifikasi	1

### 8. Tanggapan Kepala Sekolah terhadap SLB Pasca Implementasi Sekolah Inklusi

Waktu ditanyakan masa depan SLB setelah diselenggarakannya Sekolah Inklusi, semua Kepala Sekolah menjawab optimis bahwa SLB tetap akan eksis, tidak ada masalah dan tetap berjalan karena berbagai alasan:

*Pertama*, tidak semua ABK bisa ditampung/ditangani oleh Sekolah Inklusi karena: (1) Anak tuna grahita (ringan, sedang) yang memiliki kekhususan yaitu IQ-nya di bawah anak normal biasa tidak bisa diikutsertakan pada kelas inklusi bersama anak normal biasa, dan ini hanya bisa ditangani dan ditampung oleh lembaga yang sudah profesional, yaitu SLB, (2) Anak tuna rungu wicara juga tidak mudah masuk kelas inklusi karena tidak semua mata pelajaran bisa disampaikan dengan bahasa isyarat, (3) Anak tuna netra yang memiliki IQ di atas rata-rata memungkinkan bisa masuk di Sekolah inklusi asal disertai dengan Guru Pembimbing Khusus (GPK), (4) Anak tuna daksa yang memiliki IQ normal di atas rata-rata paling memungkinkan bisa diterima di Sekolah inklusi. Meski keterbatasan fisik, asalkan disediakan fasilitas yang memadai, mereka akan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti anak normal biasa, dan (5) Anak lambat belajar dan anak autisme juga memungkinkan bisa ditangani oleh Sekolah Inklusi asal ada GPK

*Kedua*, sebagian besar orang tua dari anak penyandang ketunaan masih lebih mempercayakan anaknya dididik di SLB yang sudah cukup berpengalaman daripada memasukkan pada Sekolah Inklusi yang belum berpengalaman untuk menangani.

*Ketiga*, sekolah Inklusi mungkin bisa dibuka di daerah / kota / kecamatan yang tidak ada SLB-nya. Tentang GPK-nya bisa bekerja sama dengan SLB terdekat. Beberapa SLB sudah bekerjasama dalam hal penyediaan GPK di Sekolah Inklusi, seperti yang dilakukan SLB N Wonogiri dan SLB N Sragen.

*Keempat*, sebagian besar masyarakat, terutama dari kalangan orang tua anak ABK belum mengetahui persis tentang Sekolah Inklusi dibanding dengan SLB yang sudah lebih familiar.

*Kelima*, SLB yang ada sudah cukup mapan, sarana dan prasarana cukup memadai, gedung, dan peralatan cukup representatif, secara institusional memiliki legalitas yang kuat, dan tenaga cukup profesional sehingga SLB akan tetap eksis keberadaannya.

## 9. Tanggapan Kepala Sekolah terhadap Kemungkinan Menerima Anak Normal Biasa

Mengingat keberadaan SLB yang sudah mapan, dan sesuai dengan rumusan Sekolah Inklusif, yaitu Sekolah Biasa/Sekolah Umum, yang mengakomodasi semua ABK atau SLB/Sekolah Luar Biasa/Sekolah Khusus yang mengakomodasi anak biasa, setelah ditanyakan apakah ada rencana SLB akan menerima anak normal biasa, maka jawabnya: (1) satu SLB sudah melaksanakan, (2) dua SLB ada rencana, sudah dipersiapkan, (3) lima SLB sedang mempertimbangkan, dan (4) empat SLB menyatakan tidak akan menerima anak normal biasa.

## 10. Dukungan Masyarakat dan Orang Tua dan Lingkungan

Dari isian angket diperoleh penjelasan bahwa: (1) dukungan masyarakat cukup baik dan komite sekolah cukup aktif, (2) dukungan orang tua sangat baik, ada paguyuban orang tua siswa, dan selalu dijalin komunikasi dengan orang tua, serta (3) lingkungan sekolah cukup mendukung dan kondusif terhadap SLB

## SIMPULAN

Mencermati kesepuluh (10) peta potensi dari 12 SLB yang diteliti kiranya dapat dipakai untuk menggambarkan SLB di seluruh wilayah Surakarta. *Pertama*, SLB se wilayah Surakarta ternyata cukup potensial karena : (1) Peserta didiknya cukup banyak. Ada 1522 anak dari berbagai jenjang pendidikan, dari TK sampai SLA, (2) Guru Pembimbing Khusus cukup memadai, dari 111 orang GPK, yang sudah tersertifikasi ada 40 orang, (3) Memiliki berbagai tenaga profesional (Dokter, Psikolog, dan Pakar pendidikan) dari hasil kerjasama dengan berbagai instansi, (4) Kepala Sekolah memiliki pengalaman yang cukup, (5) Masing-masing SLB memiliki lahan yang cukup, gedung yang representatif, serta sarana dan prasarana cukup memadai, (6) Ada dukungan yang kuat, baik dari orang tua, masyarakat, maupun lingkungan tentang keberadaan SLB. *Kedua*, keberadaan SLB tidak terpengaruh dengan adanya Sekolah Inklusi. Dengan adanya sekolah tersebut justru bisa bekerja sama, terutama dalam hal ikut menyediakan GPK. *Ketiga*, SLB bisa direvitalisasi menjadi pusat sumber penggalian bakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Haifani, Ayun. 2011. "Pengaruh Pelatihan Guru Peduli Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada Pengetahuan dan Sikap Penerimaan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Dasar Inklusi". *Tesis*. Fakultas Psikologi UGM.
- Herdiana, Wulan Agustin. 2010. "Perbedaan Pengelolaan Kelas Inklusi di SD Negeri dan SD Swasta se-Kota Malang". *Skripsi*. Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNM.
- Juwono, Ignatius Darma. 2011. "Pelatihan Penyusunan Rancangan Pembelajaran pada Guru Sekolah Dasar Inklusi". *Tesis*. Fakultas Psikologi UGM.
- Rahmah Marsidi, Sitti. 2011. "Pengaruh Program *Minful Teaching* terhadap Emosi pada Sekolah Guru Sekolah Dasar Pelaksana Pendidikan Inklusi". *Tesis*. Fakultas Psikologi UGM.